

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Kep. Bangka Belitung**

Ditjen Administrasi Hukum Umum (649002)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Audited

Jalan Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur

Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung , Air Itam - Pangkalpinang

Telp. (0717) 439435-439439 Fax (0717)439435

KATAPENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Desember 2021
Kepala Kantor Wilayah



ANAS SAEFUL ANWAR
NIP. 19620219 198603 1 002

DAFTAR ISI

Hal

- Kata Pengantar
- Pernyataan Tanggung Jawab
- Ringkasan
- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.3. Basis Akuntansi
 - A.4. Dasar Pengukuran
 - A.5. Kebijakan Akuntansi
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.6. Belanja Bantuan Sosial
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.2. Kas di Bendahara Penerimaan
 - C.3. Kas Pada Layanan Umum
 - C.4. Kas dan Lainnya Setara Kas
 - C.5. Investasi Jangka Pendek Pada Layanan Umum
 - C.6. Piutang PNBPN
 - C.7. Bagian Lancar TP/TGR
 - C.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran
 - C.9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
 - C.10. Beban dibayar dimuka
 - C.11. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
 - C.12. Persediaan
 - C.13. Tagihan TP/TGR
 - C.14. Tagihan Penjualan Angsuran
 - C.15. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
 - C.16. Tanah
 - C.17. Peralatan dan Mesin
 - C.18. Gedung dan Bangunan
 - C.19. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.20. Aset Tetap Lainnya
 - C.21. Kontruksi Dalam Pengerjaan
 - C.22. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.23. Aset Tak Berwujud
 - C.24. Aset Lain lain

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

- D.1. Pendapatan
- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
- D.8. Beban Bantuan Sosial
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus (Defisit) LO
- E.3. Koreksi Penyesuaian Tahun Berjalan
- E.4. Transaksi Antar Entitas
- E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya
Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
Pengungkapan Lain-lain

Laporan-Laporan Pendukung

Neraca Persediaan per 31 Desember 2021
Neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2021
Rekonsiliasi BMN Tahun Berjalan Bln Jan s.d. Desember dari Aplikasi SAIBA
Neraca Percobaan Basis AkruaI Saldo Awal e-Rekon & LK
Neraca Percobaan Basis Kas Semester II e-Rekon & LK
Neraca Percobaan Basis AkruaI Semester II e-Rekon & LK
Neraca Komparatif Semester II e-Rekon & LK
LRA Semester II e-Rekon & LK
LRA Belanja Semester II e-Rekon & LK
LRA Pendapatan Semester II e-Rekon & LK
Laporan Operasional Semester II e-Rekon & LK
Laporan Perubahan Ekuitas Semester II e-Rekon & LK
BAR SIMAK BMN Tingkat UAKPB
Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
Print Out CALK Tingkat UAKPA
LPJ Bendahara Bulan Desember 2021
Rekening Koran 31 Desember 2021
Rekap Akun
Backup Aplikasi Persediaan per 31 Desember 2021
Backup Aplikasi SIMAK BMN per 31 Desember 2021
Backup Aplikasi SAIBA per 31 Desember 2021

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002) untuk tahun anggaran 2021 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM KEP. BANGKA BELITUNG**

*Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam –
Pangkalpinang Telp. (0717) 439435-439439 fax (0717)439435
Laman : <http://babel.kemenkumham.go.id>, Email :
[kanwil.babel@kemenkumham .go.id](mailto:kanwil.babel@kemenkumham.go.id)*

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Desember 2021
Kepala Kantor Wilayah,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text 'KEPALA' at the top, 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP. BANGKA BELITUNG' around the perimeter, and 'KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG' at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring three stylized figures. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ANAS SAEFUL ANWAR
Nip 19620219 198603 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649002) Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0 Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.855.105.000 atau mencapai 99,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.858.350.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.1.855.105.000, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(1.855.105.000). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(1.855.105.000)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.0, ditambah Defisit-LO sebesar Rp.(1.855.105.000) ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp.0 dan transaksi antar entitas senilai total Rp.1.855.105.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

atatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM****KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649002)****LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1,858,350,000	1,855,105,000	99.83	1,561,110,000
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		1,858,350,000	1,855,105,000	-	1,561,110,000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649002)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas pada BLU	C.3	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	-	-
Investasi Jangka Pendek BLU	C.5	-	-
Piutang PNPB	C.6	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.10	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	-	-
Persediaan	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	-	-
Peralatan dan Mesin	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.28	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649002)

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
	D.1		
Pendapatan PNPB Lainnya		-	-
Pendapatan Badan Layanan umum		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
	D.2		
Beban Pegawai		-	-
	D.3		
Beban Persediaan		144,847,000	29,596,000
	D.4		
Beban Barang dan Jasa		829,497,000	1,167,639,000
	D.5		
Beban Pemeliharaan		-	-
	D.6		
Beban Perjalanan Dinas		880,761,000	363,875,000
	D.7		
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
	D.8		
Beban Bantuan Sosial		-	-
	D.9		
Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	-
	D.10		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		1,855,105,000	1,561,110,000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1,855,105,000)	(1,561,110,000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1,855,105,000)	(1,561,110,000)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1,855,105,000)	(1,561,110,000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649002)****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,855,105,000)	(1,561,110,000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1,855,105,000	1,561,110,000
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi Kep. Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkapinang- Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) berkomitmen dengan visi **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas
- Mewujudkan Penghormatan, pemenuhan, dan Perlindungan HAM.
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.

- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Yang Profesional dan Berintegritas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

(649002) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0 (nol rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0 (nol rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten	20

Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1,858,350,000	1,858,350,000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	1,858,350,000	1,858,350,000

Realisasi
Pendapatan
Rp 0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-

Realisasi Belanja
Rp.1.855.105.000

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.855.105.000 atau 99,83% dari anggaran

belanja sebesar Rp.1.858.350.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0.00
Belanja Barang	1,858,350,000	1,855,105,000	99.83
Belanja Modal	0	0	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	1,858,350,000	1,855,105,000	99.83
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	1,858,350,000	1,855,105,000	99.83

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 18,83 % dari TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,855,105,000	1,561,110,000	18.83
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,855,105,000	1,561,110,000	18.83

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0.

*Belanja Barang
Rp.1.855.105.000*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.855.105.000 dan Rp. 1.561.110.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan	431,872,000	343,943,000	-
Belanja honor kegiatan	221,150,000	138,100,000	-
Belanja Barang Non Operasional lainnya		105,746,000	-
Belanja barang persediaan Penanganan Pandemi	144,847,000	29,596,000	-
Belanja Jasa	126,500,000	88,407,000	-
Belanja jasa penanganan Pandemi COVID	49,975,000	491,443,000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	880,761,000	363,875,000	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	1,855,105,000	1,561,110,000	-

Belanja Modal Rp.

0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0	-
Belanja Modal Lainnya	-	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk 31 Desember 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	0	-
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian	-	-	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2021	T.A 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	-	-	-
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Bantuan Sosial Rp 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Sekretariat Utama	-	-	-
Penerima Bantuan melalui Deputi Sistem	-	-	-
Penerima Bantuan melalui Deputi LKPP	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing eselon I disajikan pada lampiran.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas pada BLU
Rp0*

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas di BLU TA 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada eselon I disajikan dalam lampiran.

*Investasi Jangka
Pendek BLU Rp0*

C.5 Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU, disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU TA 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Deposito	-	-
SBN	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp 0

C.6 Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon I disajikan pada lampiran.

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp0

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2021 dan 2020

No	Nama	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		0	0

Bagian Lancar TPA
Rp 0

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang Lancar Rp0

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Lancar TA 2021

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	JK Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.10 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Pembayaran sewa Kendaraan Dinas	-	-

Rincian Beban Dibayar di Muka berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I disajikan dalam lampiran.

Persediaan Rp0

C.12 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Persediaan	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku cadang	-	-
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember

2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per eselon 1 disajikan dalam lampiran

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0.00%	-
Diragukan	-	0.00%	-
Macet	-	0.00%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp0

C.16 Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
ilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	-

Peralatan dan Mesin Rp0

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp	-
Mutasi tambah:	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	-

Gedung dan Bangunan Rp0

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan 0.

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan

2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.0*

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.23 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud(ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud TA 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp -
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2018		Rp -

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.24 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Perbandingan Rincian Aset Lain-lain TA 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-
2	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	-
Jumlah		-

Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2020	-
Mutasi tambah:	
reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	-	-	-
2	Paten	-	-	-
Jumlah		-	-	-
B	Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-
Total		-	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp.0

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002), Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0

C.28 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin, yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) berupa jasa pelatihan dan penyusunan neraca awal belum selesai dilaksanakan hingga tanggal pelaporan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada lampiran.

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2021 dan TA 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Rp0

C.32 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri berasal dari pembelian peralatan dan mesin, dan berada pada satker BLU di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Pelaporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri TA 2021 dan TA 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
BLU Pusat Kanwil Kemenkumham Babel	-	-
Kanwil Kemenkumham Babel	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp0

C.33 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp0*

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649002) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	-	-	-
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-
Jumlah Pendapatan BLU	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Beban Honorarium dan vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Persediaan
Rp.144.847.000*

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.144.847.000 dan Rp.29.596.000 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	144,847,000	29,596,000	0.20
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	144,847,000	29,596,000	-

*Beban Barang dan Jasa
Rp.829.497.000*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.829.497.000 dan Rp. 1.167.639.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional			-
Beban Barang Nonoperasional			-
Beban Bahan	431,872,000	343,943,000	
Beban Honor Output Kegiatan	221,150,000	138,100,000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya		105,746,000	
Beban Sewa		491,443,000	
Beban Jasa Profesi	28,700,000	21,200,000	
Beban Jasa Lainnya	97,800,000	60,439,000	
Beban jasa-Penanganan Pandemi COVID	49,975,000	6,768,000	
Beban Modal Peralatan dan Mesin			
Beban Perjalanan Biasa			
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Beban persediaan konsumsi			
Jumlah	829,497,000	1,167,639,000	-

*Beban
Pemeliharaan Rp0*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Perjalanan Dinas
Rp.880.761.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.880.761.000 dan Rp.363.875.000 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri		-	-
Beban Perjalanan Biasa	637,357,000	335,385,000	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,450,000	17,990,000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36,668,000	10,500,000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200,286,000		
Jumlah	880,761,000	363,875,000	142.05

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus/Defisit
Kegiatan
Non Operasional
Rp0

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12. POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO
Rp (1.855.105.000)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah defisit sebesar Rp(1.855.105.000) dan (Rp.0).

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi
Nilai Persediaan
Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.1.855.105.000

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.855.105. dan Rp.0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,855,105,000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1,855,105,000

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp.1.855.105.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.296.300 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp7.296.300.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang

berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 9890686490021000

Nama Rekening : BPG 015 KANWIL KEMENKUMHAM
PROV.BABEL-DITJEN AHU

Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946
(PERSERO) TBK-PANGKALPINANG

Surat Izin : S-1062/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 08-06-2020

B. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Nomor: W.7-3006.KU.03.03 Tahun 2021 Tentang Perubahan susunan Pejabat Pembuat Komitmen dari PLH. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung Tahun 2021, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021:

KPA : ANAS SAEFUL ANWAR

PPK : DULYONO

Bendahara : EDI KURNIAWAN

C. Realisasi Anggaran s.d Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,83%

D. Kegiatan yang telah dilaksanakan Januari-Desember TA 2021 sbb:

1. Kegiatan Talk Show Radio Sosialisasi manfaat pendaftaran badan usaha guna meningkatkan Investasi di wilayah di Radio Republik Indonesia(RRI) Bangka tanggal 19 Juni 2021.
2. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Pemilik Manfaat (Beneficial

Ownership) Melalui Video Conference Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Juni 2021.

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 25 Juni 2021.
 4. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pemenuhan Tarja B.09 “Menciptakan Kondisi/Iklim Ramah Investasi Yang Responsif Terhadap Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang” Melalui Talkshow Radio bertempat di Radio Rakyat Indonesia.
 5. Kegiatan Talkshow Radio Sosialisasi Manfaat Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Tarja B.09 “Meningkatkan Jumlah Pendaftaran Badan Hukum Hingga Level Kabupaten Melalui Talkshow Radio bertempat di Radio Sonora Pangkalpinang.
 6. Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Notaris Melalui Pengenalan Pengguna Jasa Notaris Untuk Menghindari Praktik Pencucian Uang bertempat di Pia Hotel Pangkalpinang.
 7. Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Prov. Kep. Bangka Belitung.
 8. Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Korporasi dengan tema “Transparansi Pelaporan Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme oleh Korporasi.
 9. Pameran Legal Expo dalam rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dhika 2021.
 10. Rapat Koordinasi Pengawasan Notaris tahun 2021.
- E. Terdapat belanja jasa-penanganan pandemi COVID 19 (rapid antigen) sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp.49.975.000,- dan belanja persediaan konsumsi penanganan pandemic COVID 19 sebesar Rp.Rp.105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.104.875.000,-.
- F. Tidak ada catatan pada e rekon
- G. Tidak ada kendala yang dihadapi

